

Harian	: Mercusuar
Hari, tanggal	: Kamis, 29 September 2011
Keterangan	: Halaman 1 Kolom 2-6; Halaman 11 Kolom 1-3
Entitas	: Kabupaten Buol

KEPEMIMPINAN AMRAN

Buol Bakal Lima Kali *Disclaimer*

BUOL, MERCUSUAR- Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol atas APBD 2011 terancam kembali memperoleh opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat), jika temuan BPK RI sebelumnya belum bisa segera ditangani pemerintah setempat. Dengan demikian, Buol untuk ke lima kalinya secara berturut-turut mendapat penilaian *disclaimer*.

Prediksi itu disampaikan Wakil Ketua Tim Tuntutan Perbenda-

(Pemkab) Buol, Sutirto Lamora, menyikapi mepetnya waktu yang tersisa untuk menuntaskan seluruh temuan LK Pemkab Buol pada tahun sebelumnya. Saat ini tersisa tiga bulan bagi Tim TPTGR untuk menindaklanjutinya.

"Jika apa yang menjadi temuan tidak bisa tertagih, bisa saja (terjadi *disclaimer*) karena itu kan merupakan salah satu sumber dan salah satu indicator, sehingga jika anggaran tidak kembali, maka itu bisa saja

jadi *disclaimer*," kata Sutirto, di Kantor Bupati, Rabu (28/9).

Untuk itu, katanya, tak ada pilihan bagi tim TPTGR selain konsisten dan bersikap tegas dalam menindak lanjuti seluruh temuan BPK RI pada tahun sebelumnya agar terhindar dari opini *disclaimer* yang kelima kalinya secara berturut-turut.

Ditegaskan Sutirto, saat ini TPTGR Pemkab Buol sedang melakukan tindak lanjut atas hasil temuan BPK, BPKP maupun inspektorat.

"Tim TPTGR sedang menindak lanjuti atas hasil temuan yang diaudit oleh BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun kabupaten kepada aparatur yang ada, *disclaimer* bukan bergantung pada TPTGR tapi kita hanya mengembalikan dana atau uang Negara yang selama ini belum dikembalikan dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk uang," ungkapnya.

TPTGR Akan Bertindaktegas

• DISCLAIMER

sambungan dari hal. 1

Sutirto pada kesempatan tersebut tidak bisa memberikan data secara riil mengenai berapa jumlah keseluruhan temuan yang ada. Bahkan ia terkesan enggan mengungkapkan temuan tersebut ada di SKPD mana saja. Sutirto hanya mau menjelaskan, sejauh ini dari 30 orang yang diundang TPTGR, baru 20 orang yang menghadiri sekaligus membuat komitmen untuk menyelesaikan temuannya.

"Yang jelas ada di SKPD, 20 orang yang kita undang sudah membuat komitmen dalam bentuk pengakuan diatas surat yang telah kami siapkan, ini yang akan kami kontrol," janjinya. Adapun nantinya kata Sutirto, jika pihak yang terkait temuan melanggar komitmen batas waktu pengembalian atas tindaklanjut dari temuan tersebut, maka tidak ada jalan lain selain menggiring ke proses penegakan hukum.

Sutirto menambahkan, tidak ada desakan dari pihak TPTGR kepada orang atau badan yang terkait temuan, sebab batas waktu pengembalian merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan, pihaknya bisa memberikan dispensasi hingga tiga bulan.

"Tapi jangan sampai Bulan Desember ini, dalam artian untuk mengembalikan anggaran itu,

karena ini kan sudah cukup lama, bisa jadi temuan lagi," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Buol Ramli Kadadia menegaskan, disinilah kinerja TPTGR akan dilihat, jika TPTGR tidak tegas dan tidak menghasilkan apa-apa maka TPTGR Buol tidak berhasil melaksanakan tugasnya.

"Disini kita akan melihat kalau tidak ada pengembalian, berarti kita anggap TPTGR tidak ada kerja. Artinya, kita perlu pertimbangkan karena tidak berhasil, sekarang saya nyatakan kita harus tegas, tidak bisa lagi kita ulur-ulur" tegas Ramli.

Sebelumnya, Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buol tahun anggaran (TA) 2010, mencantumkan total temuan senilai Rp36,17 milyar (M), dengan saldo kerugian daerah sebesar Rp15,26 M.

Dengan demikian Kabupaten Buol kembali memperoleh laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran (TA) 2010 dengan penilaian *disclaimer* (tidak memberikan pendapat). Sehingga, empat tahun berturut-turut memperoleh "rapor merah" sejak 2007 hingga 2010.

Penilaian *disclaimer* tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulteng,

Dadang Gunawan pada penyerahan LHP Kabupaten Buol; akhir pekan kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Buol Amran Batalipu dan Ketua DPRD Kabupaten Buol Abdullah Batalipu.

Menurut Kepala Perwakilan Provinsi Sulteng BPK RI Dadang Gunawan, penilaian *disclaimer* tersebut disebabkan prosentase temuan sebesar 2,71 persen dari cakupan pemeriksaan.

Adapun cakupan pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Buol tahun anggaran (TA) 2010 senilai Rp1,33 Trilyun (T), meliputi neraca sebesar Rp696,44 M (yang terdiri atas: aset senilai Rp694,58 M sedangkan kewajiban senilai Rp1,86 M). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp638,61 M (terdiri atas pendapatan senilai Rp377,69 M, belanja senilai Rp260, 92 M).

Adapun pembatasan lingkup pemeriksaan, antara lain, Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp101.116.463 tidak termasuk pengembalian sisa belanja TA 2010 pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2010 sebesar Rp593,50 juta; pemberian panjar kas TA 2010 kepada SKPD dan pihak ketiga belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp6,16 M. ALL